KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggaran Gedung Baru DPR Tak Lebih Besar dari Pesawat Kepresidenan
Tanggal : Kamis, 04 Juni 2015
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 4

Anggaran Gedung Baru DPR Tak Lebih Besar dari Pesawat Kepresidenan

JAKARTA-Meski masih menuai kontra, tampaknya pembangunan gedung baru DPR RI akan tetap berjalan. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

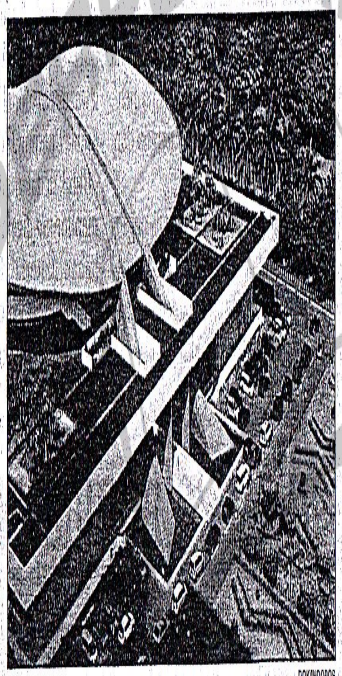
"Proyek pembangunan gedung baru DPR itu sudah mulai berjalan. Dimulai dari penataan kawasan legislatif di bawah pimpinan pak Fahri Hamzah yang dimulai dengan pembuatan alun-alun demokrasi," ujar Fadli di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin (3/6).

Meski hingga saat ini besarnya anggaran untuk pembuatan gedung baru DPR itu pun belum jelas, kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengakui jika proses pembuatan gedung baru ini harus transparan.

Namun saat ditanya besaran anggaran yang dikeluarkan DPR untuk pembuatan gedung baru, Fadli membandingkan dan balik mempertanyakan harga pesawat kepresidenan.

"Kita bukan penguasa anggaran. Tidak lebih mahal dari pesawat presiden yang katanya sampai Rp 1,5 triliun," sindirnya.

Sementara itu anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Prananda Surya Paloh mengatakan, permasalahan itu harus disadari dulu sebagai isu yang cukup sensitif. Menurutnya, disaat rendahnya performa ekonomi negara dan ketidakpuasan sosial, tiba-tiba ada permintaan DPR untuk membangun gedung baru.



DOKUMENPRIBADI

MASIH PRO KONTRA: Gedung 'Kura-Kura' DPR tampak dari tower Nusantara I. Pembangunan gedung baru DPR belum aman betul karena masih ada pro kontra di dalamnya.

"Menurut saya argumentasi umum yang pro gedung baru yaitu '9 Orang dalam satu ruangan' tidak sepenuhnya dapat diterima, mengingat sebagian Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi (SA) anggota DPR ditempatkan di Dapil. Meskipun demikian juga saya memperhatikan keluhan beberapa rekan yang memiliki ruangan sangat terbatas," ujar Prananda.

Anggota Komisi I DPR itu menegaskan, jika ruangan para wakil rakyat bekerja di Senayan jauh lebih besar dari ruangan wakil rakyat di Jepang. "Sehingga berkembang di masyarakat selama ini adalah 'Pembangunan gedung baru sebagai pemborosan ditengah rakyat yang menderita," sergahnya.

Dia menjelaskan, sesungguhnya ada beberapa pertimbangan pada situasi ini. Mengkaji lebih lanjut secara Fungsional, Historikal, dan Filosofis mengenai perlunya gedung baru DPR. "Dan paling penting adalah bersabar, menunggu psikologi masyarakat membaik, karena situasi ekonomi masyarakat hari ini sedang kurang menguntungkan," papar Prananda.

Namun, ada juga anggota dewan yang menolak gedung baru itu. Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, menyatakan, penolakannya itu didasari pada belum adanya audit menyeluruh tentang kebutuhan DPR dengan fasilitas yang ada saat ini.

"Lihat dulu kajiannya. Kalau gedung ini bagi saya jelas saya pribadi masih nolak," kata Edhy.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR itu menegaskan, kajian tentang gedung baru DPR itu harus dilakukan sebelum pembangunan dilakukan. Misalnya, mendata ruangan yang ada saat ini dan dibandingkan dengan jumlah anggota DPR beserta para tenaga ahlinya.

Pria asal Sumatera Selatan itu mengakui, para anggota DPR memang mengalami kekurangan ruangan. Namun, Edhy merasa cukup dengan ruangan yang ada saat ini. "Saya tidak mau berdebat soal itu, kalau saya sendiri tidak butuh ruangan yang terlalu besar," jelas Edhy.

Karenanya Edhy menegaskan, selama belum ada audit kebutuhan ruang dan kondisi yang ada saat ini maka dirinya tetap menolak rencana pembangunan gedung baru. Ia justru menyarankan ruangan yang tak digunakan agar bisa dimanfaatkan dulu. (dil/sis)